



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

### PENGUMUMAN

NOMOR : 1/SEK/PENG.KP1/I/2026

### TENTANG

#### PENGISIAN JABATAN KESEKRETARIATAN

PADA PENGADILAN MILITER TINGGI IV BALIKPAPAN, PENGADILAN MILITER TINGGI V MAKASSAR, PENGADILAN MILITER I-03 PEKANBARU, PENGADILAN MILITER V-18 KENDARI, DAN PENGADILAN MILITER V-21 MANOKWARI

TAHUN ANGGARAN 2026

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari, dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1838/M.KT.01/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal persetujuan ijin operasional 5 (lima) Pengadilan Militer, serta dalam rangka mendukung percepatan proses operasional pengadilan tersebut dalam memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, maka perlu dilakukan pengisian jabatan kesekretariatan pada pengadilan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding agar dapat mengusulkan pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan kesekretariatan tersebut.

#### I. DAFTAR JABATAN

Satuan Kerja	Jabatan	Eselon	Jumlah
Pengadilan Militer Tingkat Banding	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan; 2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran; 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi; 5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan; 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; 7. Analis Perkara Peradilan; 8. Penata Layanan Operasional;	IIIb IIIb IVa IVa IVa IVa	1 1 1 1 1 1 3 3



Satuan Kerja	Jabatan	Eselon	Jumlah
	9. Pengadministrasi Perkantoran; 10. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama; 11. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; 12. Pranata Komputer Ahli Pertama; 13. Arsiparis Ahli Pertama; 14. Pranata Keuangan APBN Terampil/Mahir/Penyelia.		1 1 1 1 1 1
Jumlah per pengadilan militer tingkat banding			18
Pengadilan Militer Tingkat Pertama	1. Sekretaris; 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana; 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; 5. Analis Perkara Peradilan; 6. Penata Layanan Operasional; 7. Bendahara Tk. Pertama; 8. Pengadministrasi Perkantoran; 9. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama; 10. Pranata Komputer Ahli Pertama; 11. Arsiparis Ahli Pertama; 12. Pranata Keuangan APBN Terampil/Mahir/Penyelia.	IIIa IVa IVa IVa	1 1 1 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1
Jumlah per pengadilan militer tingkat pertama			18

## II. PERSYARATAN JABATAN

1. Persyaratan jabatan perpindahan pejabat/pegawai dalam jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
2. Personel TNI dapat diusulkan untuk mengisi jabatan administrator dan jabatan pelaksana, dengan ketentuan:
  - a. Jabatan administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb), pangkat paling rendah adalah Mayor; dan
  - b. Jabatan pelaksana menyesuaikan dengan pangkat dan kualifikasi pendidikan.

## III. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Persyaratan administrasi bagi pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas, sebagai berikut:
  - a. Surat pengantar dari ketua/kepala pengadilan tingkat banding;
  - b. Hasil baperjakat oleh ketua/kepala pengadilan tingkat banding;



- c. Asli surat pernyataan persetujuan dari yang bersangkutan atau asli surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan.
2. Persyaratan administrasi bagi pengisian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, sebagai berikut:
  - a. Surat pengantar dari ketua/kepala pengadilan tingkat banding;
  - b. Hasil baperjakat oleh ketua/kepala pengadilan tingkat banding;
  - c. Asli surat pernyataan persetujuan dari yang bersangkutan atau asli surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan.
3. Bagi pengusulan pengisian jabatan yang berasal dari permohonan pribadi wajib menyertai surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan, sedangkan yang berasal dari hasil baperjakat pengadilan tingkat pertama atau banding wajib menyertai surat pernyataan persetujuan dari yang bersangkutan dengan format terlampir pada lampiran I dan II.

#### IV. PROSEDUR DAN TATA CARA PENGUSULAN

Pengusulan pengisian jabatan dilakukan dengan prosedur dan tata cara sebagai berikut:

1. Ketua/Kepala pengadilan tingkat pertama mengusulkan daftar pejabat/pegawai yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan pada peradilan militer baru kepada ketua/kepala pengadilan tingkat banding beserta surat pengantar dan hasil baperjakat pada pengadilan tingkat pertama.
2. Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding mengolah usulan dari pengadilan tingkat pertama melalui tim baperjakat pengadilan tingkat banding.
3. Ketua/Kepala pengadilan tingkat banding mengusulkan daftar pejabat/pegawai yang akan diusulkan untuk mengisi jabatan pada peradilan militer baru kepada sekretaris mahkamah agung c.q. kepala biro kepegawaian beserta dengan dokumen administrasi pendukungnya melalui link <https://tinyurl.com/JabatanMiliterBaru2026> paling lambat tanggal 16 Januari 2026.
4. Dokumen administrasi dijadikan dalam 1 (satu) file dengan format *pdf* dan ukuran maksimal 10 MB.
5. Kepala biro kepegawaian mengolah usulan dari kepala pengadilan tingkat banding untuk disampaikan kepada sekretaris mahkamah agung.
6. Sekretaris mahkamah agung melalui tim baperjakat mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada satuan kerja asal dan/atau satuan kerja yang dituju.
7. Hasil baperjakat mahkamah agung akan diumumkan melalui *website* <https://www.mahkamahagung.go.id> .



## V. JADWAL PELAKSANAAN

No	Uraian	Tanggal*
1	Pengumuman pembukaan	9 Januari 2026
2	Pengusulan kepada sekretaris mahkamah agung	9 s/d 23 Januari 2026
3	Pengolahan usulan	21 s/d 30 Januari 2026
4	Pelaksanaan baperjakat oleh Mahkamah Agung	2 s/d 6 Februari 2026
5	Pengumuman hasil baperjakat	12 s/d 13 Februari 2026
6	Penyusunan SK promosi dan mutasi	18 s/d 20 Februari 2026
7	Distribusi SK promosi dan mutasi melalui SIKEP	23 s/d 24 Februari 2026
8	Penerbitan SPMT dan/atau pelaksanaan pelantikan bagi pejabat administrator dan pengawas	25 s/d 27 Februari 2026

\*) Jadwal bersifat tentatif

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengusulan pejabat/pegawai wajib memperhatikan ketersediaan pegawai di satuan kerja asal sehingga tidak menganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pada satuan kerja.
2. Satuan kerja yang mengusulkan pengisian jabatan administrator dan pengawas pada satuan kerja baru, wajib mengusulkan pengganti dari pejabat tersebut dan tidak diperkenankan terdapat jabatan yang kosong setelah dilakukan promosi/mutasi pegawai.
3. Dalam hal mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan oleh organisasi, sekretaris mahkamah agung selaku PPK dapat mengikutsertakan kandidat lain yang tidak diusulkan oleh kepala pengadilan tingkat banding dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan persyaratan khusus (pengalaman jabatan) yang telah ditentukan.
4. Dalam pengisian jabatan ini **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN;**
5. Setiap perkembangan informasi pengisian jabatan ini disampaikan melalui website resmi <https://www.mahkamahagung.go.id/>.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2026  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,



SUGIYANTO



Lampiran I  
Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 1/SEK/PENG.KP1 /I/2026  
Tanggal : 9 Januari 2026

### **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Satuan Kerja: .....

dengan ini menyatakan bersedia untuk mengisi jabatan ..... pada ..... dalam rangka pengisian jabatan kesekretariatan pada pembentukan peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
Yang membuat pernyataan,



(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2026  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,



SUGIYANTO



Lampiran II  
Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung  
Nomor : 1/SEK/PENG.KP1 /I/2026  
Tanggal : 9 Januari 2026

## **SURAT PERMOHONAN PENGISIAN JABATAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP/NRP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Satuan Kerja: .....

dengan ini mengajukan permohonan kepada <<ketua/kepala pengadilan tingkat pertama/banding>> untuk mengisi jabatan ..... pada ..... dalam rangka pengisian jabatan kesekretariatan pada pembentukan peradilan militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2025. Sebagai konsekuensi atas permohonan saya ini, saya menyatakan bersedia untuk tidak dibayarkan biaya mutasi saya.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....  
Yang membuat pernyataan,



(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Januari 2026  
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,



SUGIYANTO

